

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari - hari manusia tidak terlepas dari risiko yang akan terjadi. Karena itu banyak masyarakat yang mempercayakan asuransi sebagai pengalihan risiko di masa yang akan datang. Namun, karena ketimpangan ilmu pengetahuan maka seringkali nasabah asuransi dirugikan karena itulah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi konsumen pengguna jasa keuangan termasuk di dalamnya asuransi. Skripsi ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penolakan klaim asuransi dan apakah penerapan perlindungan hukum yang diberikan perusahaan asuransi sudah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan tentang asuransi yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu observasi dan wawancara, serta metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang polis asuransi. Penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang ada, Undang - undang Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, Undang - undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yang mengatur perlindungan kepada pemegang polis asuransi. Adapun untuk melihat apakah perlindungan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kesetaraan antara hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

In everyday life, humans are inseparable from the risks that will occur. Because of this, many people entrust insurance as a risk transfer in the future. However, because of the gap in knowledge, insurance customers are often at a disadvantage, which is why the Financial Services Authority was formed to protect consumers who use financial services, including insurance. This thesis discusses the role of the Financial Services Authority in providing legal protection to insurance policy holders. The formulation of the problem in this thesis is what form of legal protection is provided by the Financial Services Authority against rejection of insurance claims and whether the application of legal protection provided by insurance companies is in accordance with the provisions of the laws and regulations on insurance that apply in Indonesia. The research method used in this thesis is empirical juridical, the research specification used is descriptive analysis, the type of data used is primary data, namely observation and interviews, and the data analysis method used is descriptive qualitative.

The results of this study are forms of preventive and repressive legal protection provided by the Financial Services Authority to insurance policy holders. Is the application of legal protection provided by insurance companies to insurance policy holders in accordance with existing statutory provisions, Law Number 40 of 2014 concerning insurance, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and other regulations governing protection insurance policy holders. As for seeing whether the legal protection is in accordance with the applicable provisions, namely equality between the rights and obligations of insurance companies and insurance policy holders.

Keywords : Insurance, Financial Services Authority, Legal Protection.